



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 311/DJU/HM.02.3/4/2022

Jakarta, 1 April 2022

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat
Pertama Versi 4.2.0

Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi**

di

Seluruh Indonesia

Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 810/SEK/HM.02.3/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 hal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 4.2.0, dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar memantau seluruh proses pembaruan SIPP Pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing dan melaporkan Pengadilan Negeri yang sudah dan yang belum melakukan pembaruan serta kendala yang dihadapi sehingga belum dapat memperbaharui versi SIPP 4.2.0 melalui email satgasbadilum@gmail.com.

Demikian agar segera ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 810/SEK/HM.02.3/3/2022
Lampiran : Satu Lampiran
Hal : Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi
SIPP Tingkat Pertama Versi 4.2.0

30 Maret 2022

Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI

Di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Pimpinan Mahkamah Agung perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akan dilakukan Pembaruan Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama dengan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP dari versi 4.1.1 menjadi versi 4.2.0,
2. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama agar melakukan *update* SIPP lokal selambat-lambatnya satu minggu setelah *file Update* yang akan didistribusikan secara otomatis melalui aplikasi SIPP
3. Masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan seluruh Pengadilan Tingkat Banding agar melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang ke Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya dalam pelaksanaan rilis Aplikasi SIPP Versi 4.2.0.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Rian Andri Salam, S.Kom., MMSI. (Kasubag Pengembangan Sistem Aplikasi) di nomor HP/WA 08159156404 atau sdr. Yunawan Kurnia, S.Kom, MT. (Kasubag Bimbingan Teknis) di nomor HP/WA 085697163111

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lampiran I

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 810/SEK/HM.02.3/3/2022

Tanggal : 30 Maret 2022

Berikut ini perbaikan, penambahan dan optimalisasi pada fitur maupun fungsi yang telah diterapkan pada Aplikasi SIPP versi 4.2.0 :

Semua Lingkungan Peradilan :

- Optimalisasi Register Upaya Hukum (Manual & Auto)
- Optimalisasi Sinkronisasi Data Tingkat Pertama ke Tingkat Banding Perihal Upaya Hukum
- Penambahan Fitur Pemeriksaan Tambahan Pada Proses Upaya Hukum
- Penambahan Fitur Penunjukan JS/JSP pada upaya hukum
- Optimalisasi Pendaftaran Online (menu e-Court pada Aplikasi SIPP)
- Penambahan fitur Register Induk Perkara Kepailitan dan PKPU pada SIPP Web

Lingkungan Peradilan Umum :

- Penambahan Fitur Pasca Pailit untuk Pengadilan Niaga
- Optimalisasi Proses Perkara PKPU
- Pendaftaran Perkara Perdata Khusus Melalui e-Court
- Fitur Verifikasi Data Kurator Yang Menangani Perkara
- Fitur penggabungan pendaftaran perkara KPPU
- Biaya Pendaftaran Berdasarkan Nilai Utang Perkara Kepailitan dan PKPU
- Validasi biaya untuk perkara PHI jika nilai sengketa di bawah 150 jt tidak ada biaya
- Penambahan Register Eksekusi Tanpa Keberatan Putusan KPPU & BPSK
- Penambahan Fitur Pengisian Data Penyidik & Bapas
- Perbaikan Delegasi Perkara Konsinyasi Tahap Penawaran
- Penambahan opsi untuk merekam Hasil Diversi
- Penyesuaian fitur Prodeo DIPA pada Jurnal
- Perbaikan Korban Anak menjadi saksi dan Orang Tua/Wali Saksi Anak

Lingkungan Peradilan Agama :

- Tambah Perkara kumulasi
- Tambah *check list* Ghaib pihak (alamat T dan turut T tidak diketahui)
- Penambahan Choice/Opsi untuk merekam data Bidang Ekonomi Syariah dan Akad Syariah
- Penambahan cetak tanggal BHT pada Blangko Akta Cerai
- Penyesuaian fitur Prodeo DIPA pada Jurnal

Lingkungan Peradilan TUN :

- Penambahan Klasifikasi Perkara : /G/TF dan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Daerah, Ketenagakerjaan, Pergantian Antar Waktu (PAW), Pengadaan Tanah, Pengadaan Tanah, Merek
- Penambahan pada Jurnal PK (Penambahan Biaya PNBP Penyumpahan Novum Bukti Baru PK)

Lingkungan Peradilan Militer :

- Penambahan Register Perbedaan Pendapat pada Dilmiltama sebagai Tingkat Pertama